

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tanaman perkebunan merupakan salah satu sub sektor pertanian yang memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional. Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang perkebunan (Ismail et al., 2011) subsektor perkebunan berfungsi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kontribusi subsektor perkebunan dalam PDB yaitu sekitar 3,63 persen pada tahun 2020 atau merupakan urutan pertama di sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (BPS, 2020). Selain itu (Siradjuddin, 2015) menyatakan bahwa subsektor kelapa sawit merupakan penyedia lapangan kerja yang cukup besar dan sebagai sumber pendapatan petani. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang memiliki andil besar dalam menghasilkan pendapatan asli daerah, produk domestik bruto, dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan (Arsyad, 2009), disamping itu kelapa sawit juga berperan dalam mendorong pengembangan wilayah dan pengembangan agroindustri.

Usaha perkebunan yang dikelola oleh negara memiliki luas areal yang relatif kecil tetapi keberadaannya tidak dapat diabaikan. Karena besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan oleh sektor perkebunan tidak hanya ditentukan oleh luas arealnya saja tetapi juga ditentukan oleh nilai produksi dan besar produktivitasnya. Luas areal yang besar tetapi memiliki nilai produksi yang kecil menunjukkan lahan tersebut tidak produktif. Artinya secara ekonomi memiliki nilai kontribusi yang kecil terhadap perekonomian. Olehnya itu luas areal bukanlah merupakan satu- satunya faktor yang menentukan besarnya produksi (BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2021). Salah satu usaha perkebunan negara yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit dan dikelola oleh negara ialah PTPN I Regional 8 Unit Kebun Keera.

PTPN I Regional 8 Unit Kebun Keera adalah anak usaha PT Perkebunan Nusantara I yang bergerak di bidang perkebunan dan peternakan. PTPN I Regional 8 Unit Kebun Keera terletak di Kabupaten Wajo, Kecamatan Keera, Desa Ciromanie. Unit Kebun Keera memiliki luas areal lahan pada tahun 2024 sebesar 1.481,10 hektar. Wilayah kerja bidang tanaman yang terdiri dari afdeling I (seluas 420,60 hektar), afdeling II (seluas 450 hektar), afdeling III (seluas 245 hektar), afdeling IV (seluas 185,7 hektar), afdeling V (seluas 179,80 hektar).

**Tabel 1.** Luas Wilayah Kebun Kelapa Sawit PTPN I Regional 8 Unit Kebun Keera Tahun 2024.

| No | Wilayah Kerja Bidang<br>Tanaman | Luas     | Pohon   | SPH      |
|----|---------------------------------|----------|---------|----------|
|    |                                 | (Ha)     | (Pkk)   | (Pkk/Ha) |
| 1  | Afdeling I                      | 420      | 45.844  | 109      |
| 2  | Afdeling II                     | 450      | 41.367  | 92       |
| 3  | Afdeling III                    | 245      | 22.308  | 91       |
| 4  | Afdeling IV                     | 185,70   | 19.911  | 107      |
| 5  | Afdeling V                      | 179,80   | 19.831  | 110      |
|    | Jumlah                          | 1.481,10 | 149.261 | 101      |

Sumber: PTPN I Regional 8 Unit Kebun Keera

Pemerintah telah menunjukkan perhatiannya terhadap potensi komoditas kelapa sawit dengan pelaksanaan program prioritas ANDALAN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan “Sosialisasi Sarana dan Pra Sarana Kelapa Sawit”. Berbagai upaya terus dilakukan untuk menjamin pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, baik oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Upaya-upaya tersebut meliputi pengembangan sumber daya manusia, peremajaan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung perkebunan kelapa sawit. (Dinas Tanaman Pangan, 2022).

Kemajuan yang dialami di sektor agribisnis tidak terlepas dari dukungan kelembagaan agribisnis. Menurut (Schmid, 2008) kelembagaan merupakan sejumlah peraturan yang berlaku dalam sebuah masyarakat, kelompok atau komunitas, yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Kemudian menurut (Nuraini et al., 2016) definisi kelembagaan mencakup dua demarkasi penting, yaitu norma dan konvensi (*norms and conventions*) serta aturan main (*rules of the game*). Kelembagaan kadang tertulis secara formal dan ditegakkan oleh aparat pemerintah, tetapi kelembagaan juga dapat tidak tertulis secara formal seperti pada aturan adat dan norma yang dianut masyarakat. Kelembagaan umumnya dapat diprediksi dan cukup stabil, serta dapat diaplikasikan pada situasi berulang, sehingga sering diartikan sebagai seperangkat aturan main atau tata cara untuk kelangsungan sekumpulan kepentingan (*a set of working rules of going concerns*). Jadi, definisi kelembagaan adalah kegiatan kolektif dalam suatu kontrol atau yurisdiksi, pembebasan atau liberasi, dan perluasan atau ekspansi kegiatan individu. Adapun (Aoki, 2001) kelembagaan (*institutions*) dibangun untuk menata hubungan-hubungan antar manusia (*actors*) melalui aturan yang membolehkan atau melarang suatu tindakan untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Kelembagaan dapat berupa kelembagaan formal seperti undang-undang dan peraturan, aturan hak atas

properti, serta kontrak atau kelembagaan informal seperti tabu-tabu, tradisi, *codes of conduct*, norma dan kebiasaan (*customs*).

Cakupan agribisnis yang begitu luas, melibatkan cukup banyak lembaga untuk menanganinya, beberapa diantaranya ialah lembaga perbankan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan, pergudangan, penelitian, pendidikan, penyuluhan serta lembaga swadaya masyarakat lainnya (Rukhsan, 2021). Sejalan dengan (Ngadi & Noveria, 2017) salah satu indikator keberlanjutan pembangunan usaha perkebunan kelapa sawit adalah kelembagaan petani, karena dengan adanya kelembagaan diharapkan mampu berkontribusi terhadap aksesibilitas petani terhadap pengembangan sosial, ekonomi, dan pasar.

Kelembagaan petani memiliki fungsi sebagai wadah proses pembelajaran bagi petani, wahana kerja sama, penyedia sarana dan prasarana produksi, unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran, serta unit jasa penunjang (Tampubolon et al., 2021). Kelembagaan termasuk subsistem jasa penunjang apabila dikaitkan dengan sistem agribisnis. Lembaga tersebut harus mampu berperan menunjang kegiatan dalam subsistem pengadaan sarana produksi, usahatani, pengolahan hasil pertanian dan pemasaran (Tedjaningsih et al., 2018). Arifin (2021) menyampaikan bahwa revolusi pertanian 4.0 tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dalam bidang pertanian, tetapi juga kelembagaan yang diharapkan mampu efisien dan efektif dari hulu hingga hilir. Hal tersebut menunjukkan bahwa aransemen kelembagaan pertanian sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian di era industri 4.0.

Akan tetapi, masih terdapat berbagai macam masalah yang ditemukan pada sektor kelapa sawit salah satunya terkait produksi. Melihat kondisi riil pada PTPN I Regional 8 Unit Kebun Keera, bentuk tanah pada Unit Keera kebanyakan berbentuk S3 (batuan). Menurut (Lubis & Widanarko, 2011) lahan dengan kelas S3 memiliki potensi produktivitas 13-18 ton/ha per tahun. Sedangkan produktivitas sawit pada PTPN I Regional 8 Unit Kebun Keera yang kelas lahannya S3, masih lebih rendah (4-11 ton/ha/tahun) dibanding potensi produktivitas sawit (Fadilah, 2021). Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor kelembagaan baik itu lembaga yang berperan, kendala-kendala dan regulasi atau program strategis yang dirancang maupun dilaksanakan.

Sejalan dengan penelitian (Hubeni, 2010) bahwa keadaan sektor pertanian yang kurang memuaskan saat ini terkait dengan dukungan kelembagaan terkait yang kurang memadai untuk reforma agraria dan *agriculture sustainable*. Dengan demikian, kegagalan untuk mereformasi ekonomi sektor pertanian dapat dijelaskan oleh kurangnya kelembagaan yang tepat dan tidak memperhatikan pengaruh lembaga. Analisis terkini tentang keadaan sektor pertanian menegaskan bahwa transformasi kelembagaannya dilakukan tanpa pendekatan sistematis terpadu berdasarkan metodologi yang dikembangkan dengan baik, tepat dan evaluasi proses yang terintegrasi.

Berdasarkan *issue* yang telah dipaparkan, maka penulis melihat akan perlunya penelitian yang menyajikan data dan informasi, pemetaan peran, serta

strategi penguatan kelembagaan di PTPN I Regional 8 Unit Kebun Keera yang dapat dijadikan sebagai acuan pemerintah dalam menyusun program peningkatan produksi kelapa sawit. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Kelembagaan Pertanian untuk Meningkatkan Produksi Kelapa Sawit (Studi Kasus PTPN I Regional 8 Unit Kebun Keera di Desa Ciromanie Kecamatan Keera Kabupaten Wajo)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Produktivitas sawit pada PTPN I Regional 8 Unit Kebun Keera sebesar 4-11 ton/ha/tahun dan masih jauh dari potensi produktivitas sawit (13-18 ton/ha/tahun). Kurangnya peran kelembagaan terkait dalam mendukung dan menunjang keoptimalan produksi kelapa sawit pada unit usaha ini menjadi hal yang perlu diperhatikan dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana model peran lembaga dalam program pengembangan kelapa sawit yang ada di PTPN I Regional 8 Unit Kebun Keera?
2. Kendala apa saja yang mempengaruhi lemahnya peran kelembagaan dalam peningkatan produksi kelapa sawit di PTPN I Regional 8 Unit Kebun Keera?
3. Bagaimana program strategis dalam peningkatan produksi kelapa sawit di PTPN I Regional 8 Unit Kebun Keera?

## **1.3 Research Gap**

Banyak penelitian telah dilakukan mengenai metode analisis *Interpretative Structural Modeling* (ISM) yang dapat memberikan gambaran terhadap penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang dilakukan (Taryana et al., 2021), dengan judul *Key Actors in DKI Jakarta Entrepreneurial Development Model with the Intrepretative Structural Modeling (ISM) Approach*, penelitian ini menganalisis model pengembangan kewirausahaan di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan analitis, *Interpretative Structural Modeling* (ISM). Output dari analisis ISM adalah posisi sub-elemen pada empat kuadran diagram dan penataan level berdasarkan prioritas tindak lanjut. Selain itu dengan objek penelitian yang berbeda dan metode analisis yang sama (Arsyad et al., 2020) dengan judul penelitian *Agricultural development: poverty, conflict and strategic programs in country border*, penelitian ini menyelidiki program strategis dalam peningkatan produksi pertanian untuk pengentasan kemiskinan petani kecil dan mengurangi pertanian konflik sumber daya, dengan menggunakan *Interpretative Structural Modeling*. Hasilnya menunjukkan bahwa, penguatan kelembagaan pengelolaan potensi sumber daya lokal pertanian harus lebih difokuskan pada kelembagaan di wilayah perbatasan (tingkat kabupaten) untuk menghindari konflik sumber daya di pertanian. Begitu juga dalam penelitian (Yusianto, 2019) yang juga meneliti mengenai kelembagaan lingkup pertanian dengan judul *An Interpretive Structural Modeling (ISM) approach for Institutional Development in the Central Java Potato Agroindustry*. Penelitian ini dianalisis dengan pendekatan *Interpretative*

*Structural Modeling* (ISM) tapi dengan elemen yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya.

Penelitian ini hadir dengan pendekatan yang berbeda, menonjolkan kompleksitas dan kedalaman analisis yang belum pernah dijumpai dalam studi-studi sebelumnya. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja yang tidak hanya terdiri dari elemen-elemen tunggal, tetapi tiga elemen utama yang saling terkait, masing-masing terurai menjadi sub-elemen yang lebih rinci. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus sehingga melibatkan analisis terperinci dari suatu individu, kelompok, organisasi, atau peristiwa. Penggunaan metode ini untuk memahami secara mendalam kompleksitas suatu kasus. Studi kasus memungkinkan penulis untuk melakukan analisis yang mendalam dan mendapatkan pemahaman yang kaya tentang topik penelitian.

#### **1.4 Tujuan**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan dan manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengidentifikasi bentuk kelembagaan dalam program pengembangan kelapa sawit yang ada di PTPN I Regional 8 Unit Kebun Keera.
2. Mengidentifikasi kendala yang mempengaruhi lemahnya peran kelembagaan dalam peningkatan produksi kelapa sawit di PTPN I Regional 8 Unit Kebun Keera.
3. Menentukan program strategis untuk meningkatkan produksi kelapa sawit di PTPN I Regional 8 Unit Kebun Keera.

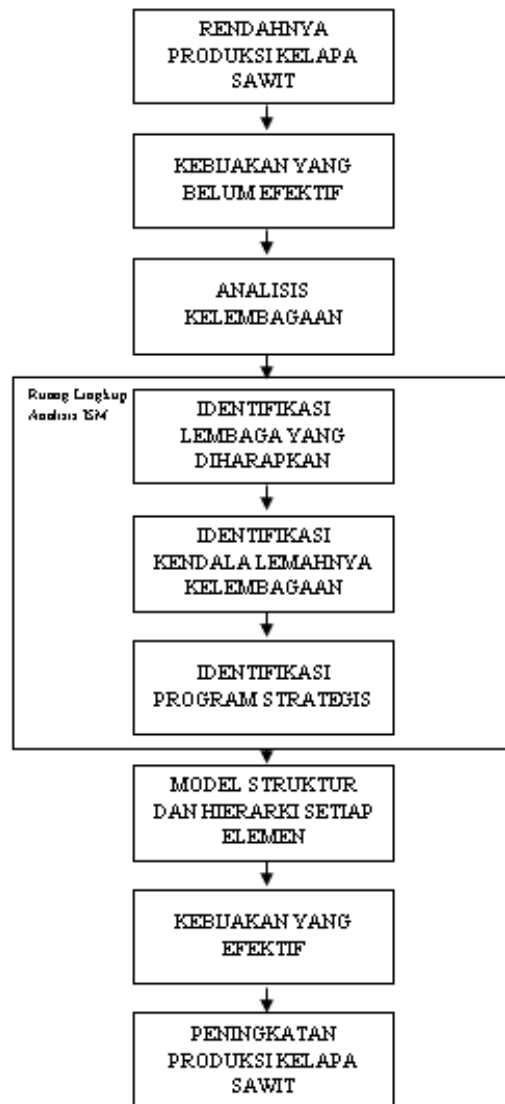
#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai bahan empiris untuk penelitian selanjutnya terutama pada bidang ilmu sosial ekonomi pertanian dalam rangka memperkaya kajian ilmiah ilmu sosial ekonomi pertanian. Begitupun diharapkan berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang penguatan kelembagaan perkebunan, terkhusus pada komoditi kelapa sawit. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu menentukan arah kebijakan program strategis dan pengembangan di bidang perkebunan, terkhusus komoditi kelapa sawit.

#### **1.6 Kerangka Pemikiran**

Rendahnya produksi disertai produktivitas lahan yang kurang optimum pada komoditas kelapa sawit menjadi masalah yang membuat pemerintah perlu mengambil arah kebijakan strategis untuk meningkatkan produktivitas komoditas tersebut. Berbagai kebijakan telah dilaksanakan untuk mengupayakan peningkatan produksi, namun sampai saat ini masih belum ada yang menunjukkan hasil yang sesuai harapan. Setelah dilakukan analisis terhadap program yang ada, kemudian diidentifikasi bahwa lemahnya kelembagaan menjadi salah satu faktor yang berdampak pada rendahnya produksi kelapa sawit.

Kurangnya peran lembaga terkait dalam mendukung dan menunjang keoptimalan produksi kelapa sawit pada unit usaha ini menjadi hal yang perlu diperhatikan dengan baik. Analisis terhadap kelembagaan menjadi urgensi untuk mengetahui aktor kunci serta lembaga mana yang diharapkan berperan dalam program peningkatan produksi kelapa sawit. Selain itu, analisis terhadap aktor juga akan menghasilkan hierarki yang jelas dalam suatu sistem untuk mempermudah pembuat kebijakan dalam merencanakan program. Selain mengidentifikasi lembaga yang berperan, juga perlu diketahui kendala-kendala yang mengakibatkan lemahnya peran kelembagaan serta program strategis dalam upaya peningkatan produksi kelapa sawit. Hal ini dilakukan untuk menyediakan suatu model yang dapat mendukung dalam perencanaan suatu program yang dapat meningkatkan produksi komoditas kelapa sawit sekaligus menguatkan kelembagaan.



**Gambar 1.** Kerangka Pikir Penelitian

## **BAB II METODE PENELITIAN**

### **2.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam serta pemahaman yang holistik dari fenomena yang akan diteliti kemudian mendeskripsikan fenomena tersebut secara naratif. Jenis desain dari penelitian ini adalah studi kasus, dimana seperti yang dikemukakan (Yin, 2009) karakteristik utama dalam studi kasus ini adalah berfokus pada kasus tunggal yang dipelajari dalam realita dan menjelaskan hubungan sebab akibat dengan mengembangkan teori yang bergantung pada sumber bukti dan menghasilkan generalisasi teori.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk menjelaskan suatu kondisi sosial dalam hal ini kelembagaan pertanian dalam suatu sistem agribisnis kelapa sawit yang kompleks berdasarkan hasil interaksi dengan pakar. Deskripsi yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu gambaran secara jelas dan sistematis mengenai struktur, hierarki, dan hubungan antar elemen yang didapatkan berdasarkan pendapat pakar (expert judgment). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner ini berupa daftar pertanyaan yang diberikan kepada pakar untuk diisi yang kemudian dikembangkan sehingga diperoleh informasi secara mendalam sesuai dengan tujuan penelitian.

### **2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di PTPN I Regional 8 Unit Kebun Keera. Penentuan daerah atau lokasi penelitian ini dipilih secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa PTPN I Regional 8 Unit Kebun Keera merupakan salah satu sentra produksi perkebunan kelapa sawit Sulawesi Selatan yang juga sebagai salah satu sumber devisa negara, serta dengan melihat komoditas kelapa sawit sebagai salah satu dari 10 komoditas unggulan ekspor. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan pada April-Mei 2023.

### **2.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara wawancara menggunakan kuesioner, data yang diharapkan untuk diperoleh adalah jawaban pakar terhadap keterkaitan antar sub-elemen berdasarkan prinsip ISM pada tiga elemen yang berbeda yaitu; (1) Lembaga yang diharapkan berperan, (2) Kendala yang memengaruhi lemahnya peran kelembagaan, dan (3) Program strategis untuk pengembangan kelapa sawit. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi atau pustaka pendukung dalam penelitian.

### **2.4 Tahapan Penelitian**

Adapun tahapan dalam penelitian ini seperti yang terlihat pada Gambar 2 adalah sebagai berikut:

1. Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini adalah pakar dalam bidang kelapa sawit di PTPN I Regional 8 Unit Kebun Keera. Penetapan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik yang berdasarkan ciri-ciri pada partisipan yang dipilih, karena ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Beberapa poin yang menjadi pertimbangan peneliti dalam memilih pakar adalah sebagai berikut: 1) Memiliki pengalaman pada bidang yang diteliti, 2) Memiliki reputasi, jabatan, atau kewenangan pada bidang yang diteliti, 3) Bersedia melakukan wawancara secara mendalam, dan 4) Memiliki pengaruh dan kepentingan yang kuat dalam pengembangan komoditas kelapa sawit. Jumlah pakar sebagai informan yang disyaratkan dalam metode ISM cukup tiga sampai tujuh orang saja (Yusuf et al., 2020). Informan dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak empat orang yang terdiri dari pakar yang diambil dari berbagai lembaga/instansi di antaranya (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, (2) Bappelitbangda, (3) BP3K, (4) PTPN I Regional 8 Unit Kebun Keera.

2. Penetapan elemen dan sub-elemen

Elemen dan sub-elemen adalah unsur penelitian yang ditetapkan dengan mengacu pada tujuan penelitian. Dalam penelitian ini ditetapkan tiga elemen, yaitu (1) Lembaga-lembaga yang berperan, (2) Kendala kelembagaan, dan (3) Program strategis. Elemen ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian, model analisis yang digunakan, atau hasil diskusi dengan pakar yang berkaitan dengan bidang keahlian kelapa sawit.

Penetapan elemen dan sub-elemen penelitian yang terdapat pada tabel berikut didasarkan pada elemen dan sub-elemen pada penelitian sebelumnya dengan fokus penelitian pada kelembagaan di sektor pertanian dan berdasarkan informasi dari beberapa pakar dalam bidang kelapa sawit (Eskarya & Elihami, 2019).

**Tabel 2.** Elemen dan Sub-elemen yang Menjadi Bahan Kuesioner Penelitian

| Elemen          | Sub-elemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lembaga Pemeran | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</li> <li>2. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</li> <li>3. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi</li> <li>4. Dinas Kehutanan</li> <li>5. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</li> </ol> |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)</li> <li>7. Lembaga Penelitian/Perguruan Tinggi</li> <li>8. Lembaga Perbankan</li> <li>9. BP3K</li> <li>10. Lembaga Swadaya Masyarakat</li> <li>11. Kelompok Tani/Gapoktan</li> <li>12. Pemerintah Desa</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kendala           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usia tanaman yang sudah tidak produktif</li> <li>2. Manajemen Pemupukan yang tidak sesuai GAP</li> <li>3. Ketidakterlibatan lembaga sejak awal</li> <li>4. Konflik masyarakat sekitar perkebunan</li> <li>5. Lahan yang diokupasi masyarakat yang termasuk HGU perusahaan</li> <li>6. Lemahnya komitmen lembaga</li> <li>7. Kurangnya kualitas SDM</li> <li>8. Terbatasnya SDM lembaga</li> <li>9. Tidak adanya lembaga pemeran yang berfungsi sebagai koordinator</li> <li>10. Terbatasnya anggaran untuk mengadakan koordinasi</li> <li>11. Terbatasnya sarana yang mendukung koordinasi</li> <li>12. Kurangnya pemahaman lembaga terhadap peran masing-masing</li> <li>13. Kurangnya integrasi dan sinkronisasi program</li> </ol> |
| Program Strategis | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program dukungan replanting</li> <li>2. Program penerapan RSPO dan ISPO</li> <li>3. Program penyuluhan petani plasma</li> <li>4. Program bantuan sarana produksi</li> <li>5. Program peningkatan SDM penyuluh</li> <li>6. Program penyediaan akses</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>terhadap modal</p> <p>7. Program pembinaan lembaga petani</p> <p>8. Program pengaktifan koordinasi antar lembaga</p> <p>9. Program ekstensifikasi lahan perkebunan</p> <p>10. Pembentukan tim khusus penelitian dan pengembangan produksi kelapa sawit</p> <p>11. Program pembentukan kemitraan petani dengan perusahaan</p> <p>12. Program penguatan regulasi klaim tanah adat</p> <p>13. Program pemerintah untuk memperjelas tapal batas perkebunan</p> <p>14. Program perubahan luas lahan yang diokupasi</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. Penyusunan Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada informan untuk diisi yang kemudian dikembangkan sehingga diperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga seri (kuesioner seri A, B, dan C) sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

### 4. Wawancara, pengisian kuesioner, dan input data

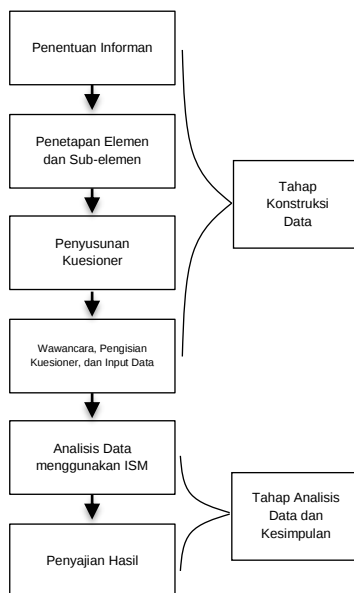
Sebelum memulai wawancara terlebih dahulu diadakan sosialisasi terhadap informan untuk memberikan pemahaman tentang metode ISM dan keterkaitan antar sub-elemen yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penelitian. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan informan dalam memahami cara pengisian kuesioner.

### 5. Analisis data menggunakan ISM

Hasil kuesioner kemudian ditabulasi sesuai kuesioner untuk kemudian dimasukkan dalam program ISM untuk mengidentifikasi elemen kunci, pembagian sub-elemen ke dalam empat kuadran, serta struktur hierarki dari setiap sub-elemen. Analisis data ini akan menghasilkan *directional graph* dan *strukturisasi level*.

### 6. Penyajian hasil

Pada tahapan ini, data akan disajikan dalam bentuk matriks (*SSIM*, *Initial ReachabilityMatrix*, *Final Reachability Matrix*, dan *Canonical Matrix*), *directional graph*, dan *strukturisasi level*. Hasil-hasil dari ISM tersebut kemudian dideskripsikan dan dianalisis untuk menjawab tujuan-tujuan dari penelitian ini.



**Gambar 2.** Diagram alur tahapan penelitian

Sumber: Rahmatullah et al., (2022)

## 2.5 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis *Interpretative Structural Modelling* (ISM) yang berfungsi untuk merumuskan struktur kebijakan yang kompleks berdasarkan elemen, merumuskan hierarki hubungan antar elemen, dan mengklasifikasikan elemen ke dalam 4 kuadran (*autonomous*, *independent*, *dependent*, dan *linkage*). *Interpretative Structural Modelling* (ISM) yang diperkenalkan pertama kali oleh Warfield (1974) merupakan sebuah metode yang sangat powerful dan dapat digunakan pada banyak bidang (Mishra & Sharma, 2015). ISM adalah alat analisis sebagai pendukung keputusan yang memfasilitasi pemahaman secara menyeluruh dalam situasi kompleks dengan mengkaitkan dan mengorganisir gagasan dalam melalui peta visual (Darmawan, 2017). Berdasarkan (Triwahyuni et al., 2021) ISM adalah sebuah metodologi perencanaan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menyimpulkan hubungan faktor dalam sebuah permasalahan. *Software Interpretative Structural Modelling* (ISM) merupakan salah satu metode dalam menstrukturkan hingga mendesain hirarki akar masalah yang bersifat abstrak dan kualitatif. Menurut (Arsyad et al., 2020) dan (Widayanto, 2013), analisis ISM dilakukan dengan tahapan utama sebagai berikut:

- 1) Menyusun *Structural Self-Interaction Matrix* (SSIM) menggunakan hasil dari kuesioner. Adapun model matriks dari SSIM seperti pada Gambar 3. Matriks ini mewakili tanggapan responden yang dinyatakan dalam empat simbol yang mewakili hubungan antara dua elemen yang sedang diteliti. Keempat simbol tersebut dinyatakan sebagai berikut:

**V:** Jika sub-elemen I memiliki hubungan kontekstual terhadap sub-elemen J, dan tidak sebaliknya.

**A:** Jika sub-elemen J memiliki hubungan kontekstual terhadap sub-elemen I, dan tidak sebaliknya.

**X:** Jika sub-elemen i dan sub-elemen j saling memiliki hubungan kontekstual.

**O:** Jika sub-elemen i dan sub-elemen j tidak memiliki hubungan kontekstual.

|   | H | G | F | E | D | C | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A |   |   |   |   |   |   |   |   |
| B |   |   |   |   |   |   |   |   |
| C |   |   |   |   |   |   |   |   |
| D |   |   |   |   |   |   |   |   |
| E |   |   |   |   |   |   |   |   |
| F |   |   |   |   |   |   |   |   |
| G |   |   |   |   |   |   |   |   |
| H |   |   |   |   |   |   |   |   |

**Gambar 3.** *Structural Self-Interaction Matrix (SSIM)*

- 2) Mengonversi SSIM menjadi *Initial Reachability Matrix* dengan mengganti simbol V,A, X, O pada kuesioner dengan angka 1 dan 0 dengan aturan seperti pada Tabel 3 sebagai berikut:

**Tabel 3.** Bentuk hubungan kontekstual dan matematis antara sub-elemen i dan j

| Bentuk hubungan kontekstual antara sub-elemen i dan j (eij) | Hubungan matematis antara sub-elemen i dan j (eij) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| V                                                           | Jika $e_{ij}=1$ maka $e_{ji}=0$                    |
| A                                                           | Jika $e_{ij}=0$ maka $e_{ji}=1$                    |
| X                                                           | Jika $e_{ij}=1$ maka $e_{ji}=1$                    |
| O                                                           | Jika $e_{ij}=0$ maka $e_{ji}=0$                    |

Kemudian matriks di awal dimodifikasi untuk menunjukkan seluruh hubungan langsung dan tidak langsung pada matriks sehingga menghasilkan final reachability matrix seperti pada Gambar 4, yaitu jika  $e_{ij}=1$  dan  $e_{jk}=1$ , maka  $e_{ik}=1$ .

|              |   | Sub Elemen j |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|--------------|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
|              |   | A            | B | C | D | E | F | G | H | DP | R |
| Sub Elemen i | A |              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|              | B |              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|              | C |              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|              | D |              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|              | E |              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|              | F |              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|              | G |              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|              | H |              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|              | D |              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|              | R |              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

**Gambar 4. Final Reachability Matrix**

- 3) Matriks *final* kemudian diolah untuk mendapatkan nilai *Driver Power* dan *Dependence* (DP-D) seperti pada Gambar 5 sehingga menghasilkan *Directional Graph*, yaitu sebuah grafik dari elemen-elemen yang berhubungan secara langsung dan menunjukkan tingkatan hierarki dan diklasifikasikan ke dalam empat sektor;
- (i) *Weak driver-weak dependent variables (Autonomous)*, sub-elemen yang terdapat pada sektor ini umumnya tidak berkaitan dengan sistem atau mungkin mempunyai hubungan yang sedikit. Sub-elemen memasuki sektor (i) jika nilai  $DP \leq 0.5$  dan nilai  $D \leq 0.5$ ;
  - (ii) *Weak driver-strongly dependent variables (Dependent)*, sub-elemen pada posisi ini tidak bebas, sangat bergantung pada sub-elemen di atasnya. Sub-elemen memasuki sektor (ii) jika nilai  $DP \leq 0.5$  dan nilai  $D > 0.5$ ;
  - (iii) *Strong driver-strongly dependent variables (Linkage)*, sub-elemen pada sektor ini perlu dikaji dengan hati-hati karena memiliki hubungan antar sub-elemen yang tidak stabil. Sub-elemen memasuki sektor (iii) jika nilai  $DP > 0.5$  dan nilai  $D > 0.5$ ;
  - (iv) *Strong driver-weak dependent variables (Independent)*, sub-elemen pada sektor ini merupakan variabel bebas yang memiliki pengaruh besar terhadap sub-elemen yang lain. Sub-elemen memasuki sektor (iv) jika nilai  $DP > 0.5$  dan nilai  $D \leq 0.5$ .

|                     |   |             |   |   |   |           |   |   |   |
|---------------------|---|-------------|---|---|---|-----------|---|---|---|
| <i>Driven Power</i> | 8 |             |   |   |   |           |   |   |   |
|                     | 7 |             |   |   |   |           |   |   |   |
|                     | 6 | Independent |   |   |   | Linkage   |   |   |   |
|                     | 5 |             |   |   |   |           |   |   |   |
|                     | 4 |             |   |   |   |           |   |   |   |
|                     | 3 | Autonomous  |   |   |   | Dependent |   |   |   |
|                     | 2 |             |   |   |   |           |   |   |   |
|                     | 1 |             |   |   |   |           |   |   |   |
|                     |   | 1           | 2 | 3 | 4 | 5         | 6 | 7 | 8 |
| <i>Dependence</i>   |   |             |   |   |   |           |   |   |   |

**Gambar 5.** *Directional Graph Driver Power dan Dependence (DP-D)*

Analisis ISM dibuat berdasarkan pengolahan data dan informasi dari para pakar untuk mendapatkan matriks yang konsisten dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan. Informan pakar ditentukan dengan beberapa pertimbangan, yaitu 1) Memiliki pengalaman pada bidang yang diteliti, 2) Memiliki reputasi, jabatan, atau kewenangan pada bidang yang diteliti, dan 3) Bersedia melakukan wawancara secara mendalam (Sinaga et al., 2019).